

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH,
PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN KETAATAN PADA PERATURAN-PERUNDANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Gelar
Sarjana Akuntansi**



OLEH:

BENYAMIN DAPA MAWO

NIM. 2017110045

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

M A L A N G

2023

RINGKASAN

Organisasi-organisasi pemerintah secara bertahap diharapkan menunjukkan pencapaian yang efektif dalam tugas dan kemampuan utama mereka. Kemajuan suatu asosiasi akan sangat dipengaruhi oleh kapasitasnya dalam menyampaikan data secara transparan, adil dan merata kepada setiap individu (mitra) yang terlibat erat. Dengan mendominasi data yang disesuaikan, pihak-pihak yang terkait dengan asosiasi dapat mengambil pilihan yang masuk akal. Sebagai tanda tanggung jawab, organisasi pemerintah diharapkan bersiap-siap, mengumpulkan dan menyerahkan data pelaksanaan yang dicatat dalam bentuk hard copy dan secara berkala. Pengungkapan berbagai hal ini dituangkan dalam arsip Kerangka Tanggung Jawab Pelaksanaan Organisasi Otoritas Publik (SAKIP). Sesuai Pedoman Resmi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kerangka Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (SAKIP), disebutkan bahwa selain mengupayakan terselenggaranya pemerintahan yang lebih cakap, berkuasa, bersih, dan dapat diandalkan, dipandang perlu adanya tanggung jawab. menulis tentang presentasi kantor-kantor pemerintah untuk menentukan kapasitasnya dalam mencapai visi, misi dan tujuan asosiasi.

Bidang pemeriksaan telah selesai dilaksanakan di Kantor Sumber Daya dan Moneter Daerah Rezim Malang sejak Agustus 2023. Sumber informasi yang akan digunakan dalam eksplorasi ini adalah informasi esensial dan informasi pilihan. Informasi esensial adalah informasi yang langsung dikumpulkan oleh para ilmuwan melalui pengumpulan informasi di lapangan dan tidak diperoleh dari orang lain. Informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh secara implikasi, informasi ini diperoleh analisis melalui konsekuensi pengumpulan informasi yang dilakukan oleh orang lain.

Kata Kunci: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi-organisasi pemerintah secara bertahap diharapkan menunjukkan pencapaian yang bermanfaat dalam tugas dan kemampuan utama mereka. Hasil dari suatu asosiasi akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan data secara langsung, dengan cara yang wajar dan tidak memihak kepada setiap individu (mitra) yang terlibat erat. Dengan mendominasi data yang disesuaikan, pihak-pihak yang terkait dengan asosiasi dapat mengambil pilihan yang masuk akal. Sebagai tanda tanggung jawab, organisasi pemerintah diharapkan merencanakan, memerintahkan dan menyerahkan data pelaksanaan yang dicatat dalam bentuk hard copy dan secara berkala. Paparan yang berbeda-beda ini tergambar dalam laporan Kerangka Tanggung Jawab Pelaksana Badan Otoritas Publik (SAKIP). Sesuai Pedoman Resmi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kerangka Tanggung Jawab Penyelenggaraan Jabatan Otoritas Publik (SAKIP), disebutkan bahwa selain mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih cakap, berkuasa, bersih dan cakap, maka dipandang perlu adanya tanggung jawab. memberikan penjelasan tentang presentasi kantor-kantor pemerintah untuk menentukan kapasitas mereka dalam mencapai visi, misi dan tujuan asosiasi.

Dengan tujuan akhir untuk menyelenggarakan pemerintahan yang sempurna dan bebas dari Persekongkolan, Kekotoran batin, dan Nepotisme (KKN), serta memenuhi tuntutan masyarakat atas tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, maka dilaksanakan Kerangka Tanggung Jawab Penyelenggaraan Penyelenggara Pemerintahan (SAKIP) yang dikoordinasikan dengan kerangka penting pengaturan, kerangka rencana pengeluaran, dan kerangka pembukuan

pemerintah yang terjadi setelah diterbitkannya Pedoman Resmi Nomor 7 Tahun 1999 yang disegarkan dengan Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengungkapan Keuangan dan Penyelenggaraan Organisasi Pemerintah. Kerangka kerja inilah yang kemudian melahirkan Laporan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Badan Publik (LAKIP) sebagai hasilnya. Kerangka kerja ini memperkirakan pencapaian atau kegagalan proyek dan kegiatan dengan menilai tingkat pencapaian pelaksanaan yang dapat diakui sebagai hadiah atas pengeluaran anggaran dan memberikan kritik atas ketidakmampuan mencapai tujuan untuk mengembangkan metodologi lebih lanjut di kemudian hari. Masyarakat meminta pelaksanaan pertanggungjawaban yang baik dan terbuka baik oleh pemerintah pusat maupun asosiasi pemerintah daerah (Suhendri, Hardianto, dkk., 2023) (Indrihastuti dkk., 2023).

Oleh karena itu, pertanggungjawaban masyarakat harus dilakukan dalam pembukuan pemerintah agar mempunyai pilihan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang menjunjung tinggi akses yang lancar dan cepat bagi daerah merupakan kerangka kerja pemerintah yang optimal untuk pergantian peristiwa di tingkat provinsi (Han dan Hong, 2019). Pemerintahan yang hebat sering kali dicirikan sebagai pemerintahan yang hebat yang mana pelaksanaan kemajuan dewan mampu dan sesuai dengan standar pemerintahan mayoritas dan sektor bisnis yang efektif, menghindari kesalahan alokasi cadangan spekulasi, mencegah pencemaran baik secara strategis maupun strategis. berwibawa, dan menjalankan disiplin perencanaan keuangan (PJT BPKP, 2020). Penyelenggaraan administrasi yang baik merupakan syarat utama untuk memahami kerinduan individu dalam mencapai tujuan dan sasarannya sesuai Pedoman Resmi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kerangka Tanggung Jawab Penyelenggaraan Badan Otoritas Publik (SAKIP). Dengan asumsi direktur pemerintah daerah menunjukkan tanggung jawab yang besar, daerah akan melihat bahwa kantor provinsi bekerja secara ideal dalam

melibatkan aset wilayah dan berupaya menampilkannya di mata publik (Rana dkk., 2019). Laporan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Organisasi Pemerintah Daerah (LAKIP) merupakan kumpulan LAKIP seluruh SKPD di lingkungan Rezim Malang. Rendahnya pemaparan Pemerintahan Daerah Malang yang mendapat kelas D pada evaluasi LAKIP oleh Ilustratif BPKP Wilayah Jawa Timur selama tahun 2012 hingga 2013 dikaitkan karena kesiapan SKPD LAKIP yang belum sesuai materi aturan. Melihat keanehan tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam pendalaman ini adalah bahwa laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan organisasi Pemerintahan Daerah Malang yang merupakan kumpulan LAKIP dari seluruh SKPD masih belum sesuai dengan peraturan yang telah disiapkan oleh Negara. Pembentukan Organisasi (LAN).

Eksekusi yang lebih berkembang juga memerlukan fokus pada iklim yang dapat mendorong dan menyaring pengakuan tanggung jawab. Pelaksanaan SAKIP untuk menjamin anggaran hanya digunakan untuk mendukung proyek atau kegiatan yang diperlukan yang membantu tujuan pembangunan. Terselenggaranya Kerangka Pembukuan Pemerintahan yang baik dan terpusat dalam suatu organisasi pemerintahan dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa tanggung jawab atas proyek dan aset yang dihibahkan kepada negara terdekat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum (Ramadhan, 2019). Permasalahan yang sering terjadi pada organisasi pemerintah dalam mengawasi rencana belanja adalah banyak proyek yang tidak berjalan sesuai rencana sehingga sebagian besar rencana keuangan terbuang percuma (Sella et al., 2020). Pandangan ini terjadi hampir di semua kantor yang menyebabkan pemborosan anggaran, namun anggaran yang dikeluarkan tidak terlalu membantu. Program yang tidak memiliki tujuan yang jelas dapat menimbulkan gambaran bahwa Pemerintah Provinsi tidak dipercaya oleh masyarakat pada umumnya (Jawadi et al., 2017).

Pemberian data dan pengungkapan eksekusi moneter berkaitan dengan pemenuhan kebebasan individu, khususnya pilihan untuk memperoleh data, pilihan untuk mempertimbangkan tujuan dan sentimennya, pilihan untuk diberikan klarifikasi, dan pilihan untuk meminta pertanggungjawaban. Data yang diberikan merupakan sumber yang dapat dipertahankan dan memenuhi tujuan tanggung jawab (Zulharman et al., 2015). Persoalan utama yang ditemukan BPK adalah terkait pengakuan bantuan sosial yang tidak memenuhi pengakuan sebenarnya, serta penatausahaan harta yang tidak memenuhi persyaratan rinci karena lemahnya sistem pembukuan keuangan dan SDM terkait pengumuman keuangan. , sehingga mempengaruhi sifat laporan moneter yang dibuat. Untuk melakukan perincian keuangan yang bertanggung jawab, Otoritas Publik diharapkan memberikan kejelasan mengenai laporan keuangan berkualitas yang dapat dimanfaatkan oleh klien seperti organisasi dan investor (Yuniarti, 2015). Melaksanakan pemerintahan yang hebat adalah kemauan bersama kita. Tanggung jawab diterima untuk dapat mengubah keadaan suatu pemerintahan yang tidak dapat menawarkan jenis bantuan publik yang baik dan buruk terhadap permintaan pemerintah dengan aturan mayoritas. Melaksanakan pemerintahan yang bertanggung jawab akan mendapat dukungan dari masyarakat umum. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap apa yang dikoordinasikan, diatur dan dilaksanakan oleh program-program terbuka (Riantiarno dan Azlina, 2011).

Selain menerapkan sistem pembukuan pemerintah yang dekat dan memahami pembukuan, konsistensi terhadap peraturan dan pedoman juga merupakan komponen penting yang terkait langsung dengan penampilan organisasi pemerintah (Karima et al., 2021). Diyakini bahwa dengan pelaksanaan sistem pembukuan pemerintah daerah yang baik, laporan pertanggungjawaban berikutnya akan selalu baik untuk memenuhi komitmen terhadap kebutuhan data pemerintah pusat dan publik. Namun, kurangnya konsistensi dan kepedulian terhadap pelaksanaan sistem

pembukuan keuangan daerah yang sesuai dengan pedoman terkait justru terjadi di banyak daerah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengakui tanggung jawab dalam pameran organisasi pemerintah, diperlukan konsistensi terhadap peraturan dan pedoman terkait (Riantiarno dan Azlina, 2011).

Permintaan tanggung jawab pelaksanaan semakin tinggi terhadap organisasi publik teritorial, khususnya BKAD Peraturan Lumajang. Diperlukan keterusterangan dalam hal pengakuan dukungan anggaran yang diatur oleh Administrasi Wilayah Rezim Malang. Informasi tentang kerangka pembukuan yang baik dan disiplin dalam melaksanakan Undang-undang akan mempengaruhi sifat laporan pelaksanaan organisasi yang harus dipelihara dan untuk individu secara keseluruhan. Pada dasarnya, tanggung jawab publik adalah penyediaan informasi dan paparan sehubungan dengan pelaksanaan dan pelaksanaan keuangan Pemerintahan Pemerintahan Malang kepada individu-individu yang terlibat erat, baik badan legislatif lokal maupun teritorial, yang harus mempunyai pilihan untuk menjadi subjek pemberian data untuk kepuasan. hak-hak istimewa masyarakat, khususnya pilihan untuk sadar, pilihan untuk mendapatkan pendidikan, dan pilihan agar keinginan mereka didengar.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka pakar tertarik untuk mengarahkan kajian yang berjudul “Dampak Penyelenggaraan Kerangka Pembukuan Daerah, Keterlaksanaan Pembukuan dan Kesesuaian dengan Pedoman Resmi pada Tanggung Jawab Pelaksana BKAD Peraturan Daerah Malang”. Pendalaman ini bertujuan untuk mendapatkan bukti yang tepat mengenai dampak penerapan sistem pembukuan wilayah, penentuan pembukuan dan kesesuaian dengan undang-undang terhadap penyerahan tanggung jawab BKAD Rezim Malang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan kerangka pembukuan provinsi, pemahaman pembukuan serta kesesuaian dengan peraturan dan pedoman secara mendasar mempengaruhi tanggung jawab penyajian BKAD Rezim Malang?
2. Apakah penerapan kerangka pembukuan daerah pada hakekatnya mempengaruhi tanggung jawab penyajian BKAD Rezim Malang?
3. Apakah pemahaman pembukuan pada dasarnya berpengaruh terhadap tanggung jawab pameran BKAD Malang?
4. Apakah kesesuaian dengan pedoman hukum mempengaruhi secara mendasar tanggung jawab pameran BKAD Rezim Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dampak penerapan kerangka pembukuan provinsi, pemahaman pembukuan dan kesesuaian dengan peraturan dan pedoman terhadap tanggung jawab penyelenggaraan BKAD Peraturan Malang;
2. Membedah dampak penerapan kerangka pembukuan provinsi terhadap tanggung jawab penyajian BKAD Rezim Malang;
3. Membedah dampak penguasaan pembukuan terhadap tanggung jawab penyajian Peraturan BKAD Malang;
4. Mengkaji dampak kesesuaian dengan pedoman hukum terhadap penyerahan tanggung jawab BKAD Peraturan Malang;

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat Peneliti

- a. Menambah hipotesis, khususnya dalam membedakan dampak pelaksanaan sistem pembukuan wilayah, memahami pembukuan dan kesesuaian dengan pedoman hukum terhadap tanggung jawab pelaksanaan;
- b. Dapat menjadi referensi bagi para ilmuwan yang akan memimpin kajian mengenai hubungan antara dampak pelaksanaan sistem pembukuan teritorial, penguasaan pembukuan dan kesesuaian dengan pedoman hukum terhadap tanggung jawab pelaksanaan.

2. Bagi Universitas

- a. Konsekuensi dari eksplorasi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber perspektif dan bahan untuk mata kuliah atau ujian selanjutnya
- b. Mengerjakan Hakikat SDM di Perguruan Tinggi Tribhuwana Tungadewi Malang, khususnya pada program konsentrasi Pembukuan.
- c. Perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas keilmuan dan wawasan lulusannya melalui tugas-tugas konklusif.

3. Manfaat Bagi BKAD

- a. Menambah data dan berperan sebagai kontribusi bagi pengurus BKAD Peraturan Malang dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan dampak pelaksanaan kerangka pembukuan wilayah, penguasaan pembukuan, kesesuaian terhadap peraturan dan pedoman serta tanggung jawab pelaksanaan;

- b. Para ilmuwan yang tertarik pada eksekusi pekerja dapat mendorong penelitian lebih lanjut yang akan mendukung pengembangan lebih lanjut eksekusi yang representatif di organisasi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 1 (2014). <https://www.peraturan.bpk.go.id>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik (Pertama)*. Salemba Empat.
- BPKP, P. J. T. (2019). Laporan Kinerja Tahun 2019. In *LAKIP BPKP Provinsi Jawa Timur*.
- BPKP, P. J. T. (2020). Laporan Kinerja Tahun 2020. In *LAKIP BPKP Provinsi Jawa Timur* (Vol. 21, Issue 3). <https://doi.org/10.52829/pw.310>
- BPKP, P. P. dan P. P. (2011). Laporan Akuntabilitas Pusdiklatwas BPKP.
- Darwanis, & Chairunnisa, S. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 6(1), 54–63. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/TRA/article/download/1367/1248>
- Fatmala, J. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah). In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 1, Issue 3). Universitas Bengkulu.
- Ghozali, I. (2009). Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS edisi III. *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*. <https://doi.org/10.1016/j.oooo.2017.11.003>
- Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program *IBM SPSS 20*.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Ed. Ketiga). Salemba Empat.
- Han, Y., & Hong, S. (2019). The Impact of Accountability on Organizational Performance in the U.S. Federal Government: The Moderating Role of Autonomy. *Review of Public Personnel Administration*, 39(1), 3–23. <https://doi.org/10.1177/0734371X16682816>
- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pub. L. No. Nomor 7 (1999).
- Irawati, A., & Agesta, C. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. *JURNAL Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 56–70.
- Indrihastuti, P., Suhendri, H., & Paila, M. I. W. (2023). Analisis Penyajian Laporan Keuangan di Kantor Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan Dan Akuntansi*, 11(2), 197–207. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/59935>
- Jawadi, F., Basuki, H. P., & Effendy, L. (2017). The effect of budget goal clarity, organizational commitment, accounting control, and adherence to laws on the perception of government

performance of Central Lombok Regency. *The Indonesian Accounting Review*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.14414/tiar.v6i1.850>

Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.

Karima, D., Maslichhah, & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 10(06), 10–24.

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, Pub. L. No. 217/PMK.05/2015 (2015).

Lumenta, A. L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2016). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA*, 4(3), 135–146.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi* (Ed. Revisi). Andi.

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pub. L. No. 239/1X/6/8/2003 (2003).

Nordiwana, D., Iswahyudi, P., & Rahmawati, M. (2008). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.

Oktaviani, S., Diskhamarzeweny, & Yulis, Y. E. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan). *Journal Information*, 10(3), 1–16.

Pemerintah, K. M. (2018). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018. In *Pemerintah Kabupaten Malang* (Vol. 1, Issue 1). http://www.nutricion.org/publicaciones/pdf/prejuicios_y_verdades_sobre_grasas.pdf
[https://www.colesterolfamiliar.org/wp-content/uploads/2015/05/guia.pdf](https://www.colesterolfamiliar.org/formacion/guia.pdf)

Pemerintah, K. M. (2019). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019. In *Pemerintah Kabupaten Malang* (Vol. 1, Issue 1). http://www.nutricion.org/publicaciones/pdf/prejuicios_y_verdades_sobre_grasas.pdf
[https://www.colesterolfamiliar.org/wp-content/uploads/2015/05/guia.pdf](https://www.colesterolfamiliar.org/formacion/guia.pdf)

Pemerintah, K. M. (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. In *Pemerintah Kabupaten Malang* (Vol. 1, Issue 1). http://www.nutricion.org/publicaciones/pdf/prejuicios_y_verdades_sobre_grasas.pdf
[https://www.colesterolfamiliar.org/](https://www.colesterolfamiliar.org/formacion/guia.pdf)

wp-content/uploads/2015/05/guia.pdf

- Pertiwi, R. U., & Utami, E. R. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Proceeding Of National Conference On Accounting and Finance*, 2, 98–118. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol2.art9>
- Raga, K., & Taylor, D. (2015). Impact of Accountability and Ethics on Public Service Delivery : A South African Perspective. *Mini Forum: Advancing Public Service Performance*, 3(5), 22–26.
- Ramadhan, H. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntanis, dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Universitas Sriwijaya.
- Rana, F., Ali, A., Riaz, W., & Irfan, A. (2019). Impact of Accountability on Public Service Delivery efficiency. *Journal of Public Value and Administration Insights*, 2(1), 7–9. <https://doi.org/10.31580/jpvai.v2i1.480>
- Razi, R. F., & Savitri, E. (2017). Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1268–1281.
- Renyowijoyo, M. (2013). Akuntansi Sektor Publik (Ed. Ke-3). Mitra Wacana Media.
- Riantiarno, R., & Azlina, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 3(3), 560–568.
- Ristyana, R., & Amirya, M. (2019). Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo. *Journal of Business Management and Accounting*, 1(3), 105–112.
- Rofika, & Ardianto. (2014). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singi. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 197–209.
- Sella, Maslichah, & Sudaryanti. (2020). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *E-Jra*, 09(no.10), 30–46.
- Setyawan, H., Rusli, A., & Hariyani, E. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *JOM Fekon*, 4(1), 251–264.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

- Suhendri, H., Hardianto, T. W., Handayanto, A. J., & Tena, P. D. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 16–24. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/5002/pdf>
- Susanto, A. (2013). Sistem Informasi Akuntansi, Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan (Perdana). Lingga Jaya.
- Syukur, M. A., Anas, M., & Astuti, P. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan Pada Peraturan Prundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk). *PGRI Kediri*, 1–16.
- Yuniarti, R. (2015). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 39–50. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i1.93>
- Zulharman, K., Zulfahridar, Z., & Hariadi, H. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 33963.